LEMBARAN - NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 27, 1955 TINDAK PIDANA EKONOMI PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. (Pendjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 801).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dengan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian;
- b. bahwa berhubung dengan itu untuk mempermudah penjelelgaraannya dianggap perlu diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

BAB I

Tentang tindak pidana ekonomi

Pasal 1.

Jang disebut tindak pidana ekonomi ialah:

- 1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan
 - a. Ordonnantie Geconproleerde Goederen 1948 (Staatsblad 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1949 No. 160;
 - b. Prijsbeheersing-ordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 295) ;
 - c. Undang-undang penimbunan barang-barang 1951 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 4);
 - d. Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253)
 - e. Undang-undang Darurat kewadajiban penggilingan padi (Lembaran Negara tahun 1952 No. 33);
 - f. Deviezen Ordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 205).
- 2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32, dan 33 Undang-undang Darurat ini.
- 3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menjebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Pasal 2.

- (1) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub le adalah kedjahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang jang bersangkutan adalah kedjahatan atau pelanggaran.

Tindak-pidana ekonomi jang lainnja, jang tersebut dalam pasal 1 sub le adalah kedjahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengadja.

Djika tindak itu tidak dilakukan dengan sengadja, maka tindak itu adalah pelanggaran.

- (2) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kedjahatan.

- (3) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kedjahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengadja; djika tindak itu tidak mengandung anasir sengadja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnja djika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Pasal 3.

Barangsiapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi jang dilakukan didalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitupula djika ia turut melakukan tindak-pidana ekonomi itu diluar negeri.

Djika dalam Undang-undang Darurat ini disebut tindak-pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak-pidana ekonomi pada khususnya maka didalamnya termasuk pemberi bantuan pada atau untuk melakukan tindak-pidana itu dan pertjobaan untuk melakukan tindak-pidana itu, sekadar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya.

BAB II.

Tentang hukuman-pidana dan tindakan tata-tertib.

Pasal 5.

Djika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukuman-pidana atau tata-tertib jang dapat diadakan sesuai dengan Undang-undang Darurat ini.

Pasal 6.

- (1) Barangsiapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi :

a. dalam hal kedjahatan sekadar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub le dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu ;

b. dalam hal kedjahatan sekadar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu ;

- c. dalam hal pelanggaran sekedar jang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub le d dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja setahun dan hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
 - d. dalam hal pelanggaran jang disebut berdasar pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginja limapuluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
- (2) Djika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau jang diperoleh baik seluruhnja, maupun sebagian-karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi dari pada serempat bagian hukuman denda tertinggi jang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan b, hukuman denda itu dapat ~~diberikan~~ setinggi-tingginja empat kali harga barang itu. *(ditentukan)*
- (3) lain dari pada itu dapat didjatuhkan djuga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 7 ayat 1 atau tindakan tatatertip tersebut dalam pasal 8, dengan tidak mengurangi/hal-hal jang memungkinkannja didjatuhkannya tindakan tatatertip jang ditentukan dalam peraturan lain. *(dalam)*

Pasal 7.

(1) Hukuman tambahan adalah :

- a. pentjabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 kitab undang-undang hukum pidana untuk waktu serang-kurangnja 6 bulan dan selama-lamanja 6 tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau denda hal didjatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanja enam tahun;
- b. penutupan seluruhnja atau bagian perusahaan ^{sw} hukum, dimana tindak pidana-ekonomi dilakukakan untuk waktu selama-lamanja satu tahun;
- c. perampasan barang-barang tak tetap jang berud dan jang tak berudjut, dengan mana atau mengenai mana tindakan pidana ekonomi itu dilakukan atau jang seluruhnja atau sebagian diperolehnja dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitupula harga/ barang-barang itu jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga ~~barang~~ itu kepunjaan siter-terhukum atau bukan; *(lawan)*
- d. perampasan barang-barang jang tak tetap jang berudjut dan jang tak berudjut, jang termasuk perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga ~~lawan~~ barang-barang itu jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga ~~lawan~~ itu kepunjaan siterhukum atau bukan, akan tetapi ~~akan~~ hanja sekedar barang-barang sedjenis, mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang jang dapat dirampas menurut ketentuan ~~sub e~~ diatas;

(dan tersebut)

- e. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada siterhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun ;
 - f. Pengumuman putusan hakim.
- (2) Perampasan barang-barang yang bukan kepunjaan siterhukum tidak didjatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
 - (3) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada siterhukum.

Pasal 8.

Tindakan tata-tertib ialah :

- a. penempatan perusahaan siterhukum, dimana dilakukan suatu tindak-pidana ekonomi dibawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak-pidana ekonomi itu adalah kedjahatan dan dalam hal tindak pidana Ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun ;
- b. mewadjabkan pembajaraan uang-djaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah kedjahatan; dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang djaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun ;
- c. mewadjabkan membajar sedjumlah uang sebagai pentjabutan keuntungan menurut taksiran, yang diperoleh dari suatu tindak-pidana atau dari tindak pidana-tindak-pidana sematjam itu, dalam hal terdapat bukti-bukti, bahwa tindak-pidana itu dilakukan oleh siterhukum ;
- d. mewadjabkan mengerdjakan apa yang dilalaikan terhadap hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan djasa-djasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain.

Pasal 9.

- (1) Tindakan tata-tertib yang disebut dalam pasal 8 didjatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pengertian, bahwa dalam hal itu tidak dapat didjatuhkan tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.
- (2) Dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka waktu yang ditentukan untuk penempatan dibawah pengampuan dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan setahun dengan putusan hakim.

Pasal 10.

- (1) Dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8, segala hal yang istimewa dan segala akibat, sekadar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pengangkatan seorang atau lebih pengampuan dalam hal penempatan dibawah pengampuan.

Dalam hal didjatuhkan hukuman tambahan sebagai dis-
but dalam pasal 7 ayat 1 sub b, dapat djuga diperi-
tahkan supaja siterhukum menjerahkan segala surat-
ret jang diberikan kepadanya oleh Pemerintah untuk
keperluan perusahaannya;
mendjual barang-barang persediaan jang ada didalam
perusahaannya dibawah pengawasan ;
dan memberikan bantuannya dalam pentjataan barang
persediaan itu.

- (2) Hakim jang mendjatuhkan hukuman tambahan atau tinda-
kan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan s-
bagai termaksud diatas dalam putusan kemudian sete-
menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas per-
taan sifersangka, ataupun mengadakan perubahan ata-
tambahan dalam peraturan jang telah diadakan itu.
Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang ter-
tutup; putusan diutjapkan dimuka umum.
Putusan itu harus memuat alasan-alasan; terhadap pu-
tusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau ka-
sasi.
- (3) Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan s-
landjutnja untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan
lam pasal ini.

Pasal 11.

- (1) Sekadar hakim tidak menentukan lain, maka pengampu
diangkat berdasarkan pasal 10 atau pasal 29 Undang-
undang Darurat ini mempunjai hak-hak dan kewadji-
kewadjiaban/pengampuan termasuk dalam pasal 463 "Bur-
gerlijk Wetboek".
Orang lain tidak boleh melakukan suatu perbuatan p-
ngurusan tanpa penguasaan dari pengampu itu.
- (2) Putusan pengampuan itu oleh panitera pengadilan ja-
memutus hal itu diumumkan didalam Berita-Negara da-
didalam satu atau lebih surat-bakar jang akan ditu-
djuk oleh hakim.

Pasal 12.

Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-djaminan
seluruhnja atau sebagian akan mendjadi milik Pemerintah
apabila tidak dipenuhi sjarat bahwa sifersangka tidak a-
melakukan suatu tindak-pidana ekonomi atau apabila tida-
dipenuhi sjarat-sjarat khusus jang ditentukan oleh haki-
Didalam hal itu pasal-pasal 14b, ayat 2 dan 3, 14c ayat 3
14d, 14e dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan p-
sal-pasal 3,4 dan 5, Staatsblad 1926 No. 251 juncto 486
berlaku sepadan.

Pasal 13.

- (1) Hak melaksanakan perampasan tidak lenjap karena me-
ninggalnja siterhukum.
- (2) Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub a
b lenjap karena meninggalnja siterhukum.

Pasal 14.

- (1) Pembayaran djumlah uang jang dalam hal perampasan
taksir atas barang-barang jang tidak disita, dilak-
menurut aturan-aturan mengenai pelunasan hukuman d-
da dengan sukarela. Djika pelunasan itu tidak dila-
kan maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukuma-
denda berlaku sepadan.

↳ jang sama dengan
hak-hak dan kewadji-
ban-kewadjiaban

- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku djuga bagi uang djaminan, djumlah uang tersebut dalam pasal 8 sub c dan biaja lain dari pada biaja pengumuman putusan hakim, dengan pengertian bahwa tidak di djatuhkan hukuman badan pengganti.

Pasal 15.

- (1) Djika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang jang lainnja atau suatu jajasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib didjatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseoran, perserikatan atau jajasan itu, baik terhadap mereka jang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanja.
- (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan djuga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, djika tindak itu dilakukan oleh orang-orang jang, baik berdasar hubungan-kerdja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir anasir tindak-pidana tersebut.
- (3) Djika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum suatu perseroan, suatu perserikatan orang jang- atau jajasan, maka badan hukum perseroan, perserikatan atau jajasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, djika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu, Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaja seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaja pengurus itu dibawa kemuka hakim.-

(4) Djika suatu

- (4) Djika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan/perserikatan orang atau suatu jajasan, ~~suatu~~ maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penjerahan surat surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau ditempat tinggal kepala pengurus itu atau ditempat pengurus bersidang atau berkantor.

Pasal 16. / suatu

- (1) Djika ada tjukup alasan untuk menduga, bahwa sese orang jang meninggal dunia, sebelum atas perkara ada putusan jang tak dapat diubah lagi, telah mel kukan suatu tindak pidana ekonomi maka hakim - at tuntutan penuntut umum - dengan putusan pengadilan dapat:
 - a. memutus perampasan barang-barang jang telah di ta. Dalam hal itu pasal 10 Undang-undang Darur ini berlaku sepadan ;
 - b. memutus bahwa tindakan tata tertib jang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memb ratkannja pada harta orang jang meninggal duni itu.
- (2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita-Negara dan didalam satu atau lebih surat kabar ja akan ditundjuk oleh hakim.
Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang jang berkepentingan dapat /dimana memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumu man termaksud ayat 2.
- (4) Dalam hal * itu djaksa didengar; pihak jang berke pentingan itu didengar djuga, setidak-tidaknja di panggil semestinja untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan ka limat dan dibawah a berlaku djuga, djika berdasar kan alasan-alasan dapat diterim-a bahwa tindak pi dana ekonomi itu dilakukan oleh seorang jang tida dikenal. Putusan itu diumumkan dalam Berita Negar dan didalam satu atau lebih surat kab, r jang akan ditundjuk oleh hakim.

BAB III

Tentang tjara mengusut tindak pidana ekonomi.

Pasal 17.

- (1) Selain dari pada mereka jang pada umumnja dibebal pengusutan tindak pidana, maka jang berhak mengu sut tindak pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai jang ditundjuk oleh Perdana Menteri setelah menda ngan Menteri jang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai, jang dibabanni pengusutan tindak pidana ekonomi, dibebani djuga pengusutan tindak pidana jang disebut dalam pasal 26, 32 dan 33 un dang-undang darurat itu.

(3) djika untuk

- (3) Djika untuk mereka jang disebut pada ajat 1 belum ditentukan sumpah djabatannya, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.

Pasal 18.

- (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang mensita atau ~~menuntut~~ penjerahan untuk disita semua barang-barang jang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau jang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.
- (2) Barang-barang jang disebut dalam pasal 7 ajat 1 sub d hanya dapat disita, djika disetudjui oleh djaksa.
- (3) Pensitaan dilakukan :
 - a. sekadar mengenai barang-barang ~~jang~~ tak tetap jang tak berudjut jang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penjerahan atau pengiriman dengan surat tertjatat seputjuk surat keterangan pensitaan kepada orang-jang berhak dan penjaminan ataupun pentjatat dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;
 - b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang tak tetap jang tak berudjut jang tidak termasuk sub a, dengan penjerahan atau pengiriman dengan surat tertjatat seputjuk surat keterangan pensitaan kepada orang jang berhak, dan djika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, djuga kepada mereka itu.
- (4) Djika pensitaan dihapuskan, maka djaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnja mengenai penghapusan itu dan supaya surat itu dilakukan ~~kepada~~ sepadan dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam ajat 3 surat-surat keterangan pensitaan. *dgn*
- (5) Menteri Kehakiman-dengan persetujuan Menteri jang bersangkutan - ~~jang~~ berhak menetapkan aturan-aturan lebih lanjut mengenai tjara dan akibat-akibat pensitaan itu.

Pasal 19.

- (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat meneuntut diplihatkannja segala surat jang dipandang perlu untuk diketahuinja, supaya mereka dapat melakukan tugasnja sebaik-baiknya.
- (2) Orang jang karena djabatannja atau pekerdjaannja diwadjibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menonjolkan untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian surat-surat itu jang termasuk kewadajiban ~~rahasia~~ *ml* kan itu.

Pasal 20.

- (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berha
memasuki setiap tempat jang menurut pendapatnja
perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnja. Djik
perlu pegawai-pegawai itu masuk kedalam tempat i
dengan bantuan kekuasaan umum.

- (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk kedalam sebuah rumah selain untuk mengu-
sut suatu tindak pidana ekonomi dan disertai oleh
seorang komisaris polisi atau wali kota, atau atas
perintah tertulis dari djaksa.
- (3) Dalam waktu dua kali 24 djam tentang pemasukan ru-
mah itu harus dibuat berita atjara jang selandjut-
nja disampaikan kepada djaksa.
Dalam berita atjara itu dimuat keterangan mengenai
waktu dan maksud pemasukan itu.
Pegawai-pegawai termaksud diatas berwenang meminta
disertai oleh orang-orang jang akan ditundjuk oleh
nja; dalam hal itu, maka hal ini disebut dalam ber-
ta atjara tersebut.

Pasal 21.

- (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai
pengusut berwenang mengambil tjontoh (,monster,,)
dari barang-barang:
- jang berada ditempat umum, atau jang berada di-
s suatu tempat jang boleh dikundjungi oleh chala-
jak ramai;
 - jang berada ditempat jang boleh dimasuki oleh
pegawai pengusut menurut Undang-undang Darudarat
ini ;
 - jang ditawarkan, diangkut atau jang ditawarkan
untuk diangkut, diimpor atau diekspor ;
 - jang diserahkan (,afgeleverd").
- (2) Pemegang barang2 itu wadjib memberi bantuan menurut
petundjuk-tundjuk pegawai pengusut dan dibawah per-
wasan pegawai itu dan, djika diminta, memberi alat
bantuan dan pertolongan dengan tjuma-tjuma.
- (3) Djika wawadjiban jang tersebut dalam ajat dua tidal
dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa
jang diperlukan itu atas biaya dan risiku pemegang
barang itu.

Pasal 22.

- (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengu-
sut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang2
dibuka, djika hal itu dipandang perlu untuk memerik-
barang-barang itu.
- (2) Pasal 21 ajat 2 dan 3 berlaku sepadan .

Pasal 23.

- (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut supaya pe-
ngemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendara-
nja dan menjetudjui pemeriksaan tentang diturutinjn
peraturan2 jang dimaksud dalam pasal 1 Undang-unda
Darurat ini. Djika dipandangnja perlu pegawai peng-
sut dapat menguntut supaya kendaraan itu dibawa ke
tu tempat tertentu dan membongkar atau menjuruh me-
bongkar atau mengosongkan atau menjuruh mengosongk
kendaraan itu. Djika dianggap perlu pegawai pengusu-
dapat menguntut, supaya pengemudi kendaraan itu me-
beri pertolongan menurut petundjuk-tundjuk pegawai
pengusut itu.
- (2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan
atau memberi bantuan dapat meminta djuga kepada or-
jang mengangkut barang-barang itu.

- (3). Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mendjamine dipenuhi tuntutan yang disebut dalam pasal ini.

Pasal 24.

- (1). Menteri Kehakiman - dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan - berhak menentukan aturan-aturan tentang tjara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti yang dimaksud dalam pasal 23.
- (2). Menteri Kehakiman - dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan - berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusut tindak pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan didjalan-djalan didara atau diperairan.

Pasal 25.

Terhadap
Terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam „Het Herzienne Indonesische Reglement,, ketjuali djika undang-undang Darurat ini menentukan lain.

Pasal 26.

Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari Undang-undang Darurat ini adalah tindak pidana ekonomi.

BAB IV

Tentang tindakan-tindakan tata tertib sementara

Pasal 27.

- (1). Djika ada hal-hal yang ^{di}merasa sangat memberatkan siterangka dan kepentingan-kepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka djaksa berwenang dalam segala perkara dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, terketjuali tersebut dalam pasal 6 ayat 3, selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai untuk memerintahkan kepada tersangka sebagai tindakan sementara, supaja ia;
- a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- b. berusaha supaja barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu.
- (2). Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3). Perintah-perintah itu ^{hilang} kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat mulai tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu dapat diubah atau dutjabat oleh djaksa atau oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, sebelum perkara itu diputus oleh hakim.

Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena dia batannja atau atas permohonan sifersangka; sifersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidakknja dipengadilan semestinja untuk menghadap ketjuali:

- dipanggil*
- a. djika pengadilan telah dengan segera memutus ur penguah perintah itu sesuai dengan permohonan sifersangka atau mentjabutnja;
 - b. djika belum lampau masa dua bulan sedjak permohonanja jang dahulu dan jang sama maksudnja diputu

Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan sifersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepanitaraan pengadilan.

Pasal 28.

- (1) Djika ada hal-hal jang dirasa sangat memberatkan tersangka dan kepentingan-kepentingan, jang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan jang disangka telah dilanggar memerlukan tindakan-tindakan dengan segera maka pengadilan berwenang dalam perkara mengenai tindak pidana ekonomi, ketjuali jang tersebut dalam pasal 6 ayat 3 sebelum pemeriksaan dimuka pengadilan atas tuntutan djaksa dan setelah sifersangka didengar setidak-tidakknja, dipanggil semestinja untuk menghadap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara:
 - a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sifersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan;
 - b. penempatan perusahaan sifersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan dibawah pengampuan;
 - c. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pentjabutan seluruh atau sebagian keuntungan, jang telah atau jang dapat diberikan oleh pemerintah kepada sifersangka berhubungan dengan perusahaan itu;
 - d. supaya sifersangka tidak melakukan perbuatan jang tertentu;
 - e. supaya sifersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu jang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat jang ditundjuk dalam perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannja setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanja sampai saat tidak dapat diubah lagi utusan hakim jang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu oleh pengadilan jang memeriksa perkara itu dapat diperpanjang satu kali dengan waktu selama-lamanja enam bulan dan dapat diubah atau ditjabutnja. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena djabatannja atas tuntutan djaksa dan, mengenai perubahan atau pentjabutan perintah itu, djuga atas permohonan sifersangka; sifersangka ini senantiasa didengar setidak-tidakknja dipanggil semestinja untuk menghadap, ketjuali!

/segala

- a. djika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan sidersangka atau mentjabutnja;
- b. djika belum lampau masa dua bulan sedjak permohonannja jang dahulu dan jang sama maksudnja di putus.

Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan sidersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan. *pengadilan*

Pasal 29.

- (1). Selambat-lambatnja tiga hari setelah putusanputusa termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, sidersangka dapat mohon bandingan pada Pengadilan Tinggi.
- (2). Pengadilan Tinggi mutus selekas-lekasnja tentang hal itu.
Sidersangka didengar, setidak-tidaknja dipanggil dengan semestinja untuk menghadap.

Pasal 30.

Putusan-putusan termasuk dalam pasal 27 dan 28 dapat segera dilaksanakan.

Pasal 31.

Djika suatu perkara berachir dengan tidak didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib jang demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara jang didjatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas permohonan bekas-sidersangka atau ahli-warisnja pengadilan dapat memutus, bahwa kepada bekas-sidersangka atau ahli warisnja berikan sedjumlah wang sebagai penggantinya-kerugian. Djumlah wang itu dibebankan pada Kas Negeri. Jang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan jang mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.

BAB V.

Tentang perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan hukuman pidana atau tindakan tata tertib.

Pasal 32.

Barang siapa sengadja berbuat atau tidak berbuat sesuatu jang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tertjamtum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata tertib seperti tertjamtum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termasuk dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut atas maka ia melaksanakan suatutindak pidana ekonomi.

Pasal 33.

Barang siapa sengadja, baik sendiri maupun dengan pertolongan seorang lain, menarik bagian-bagian kekajaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu

honannya jang dahulu dan jang sama maksudnja e
putus.

Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permo
nan sifersangka dalam waktu lima hari setelah per
mohonan itu diterima dikepaniteraan. *pengadilan*

Pasal 29.

- (1). Selambat-lambatnja tiga hari setelah putusanputus
termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, sit
sangka dapat mohon bandingen pada Pengadilan Tinggi
- (2). Pengadilan Tinggi mutus selekas-lekasnja tentang
itu.
Sifersangka didengar, setidak-tidaknja dipanggil
ngan semustinja untuk menghadap.

Pasal 30.

Putusan-putusan termasuk dalam pasal 27 dan 28 dapat
segera dilaksanakan.

Pasal 31.

Djika suatu perkara berachir dengan tidak didjatuhkan
hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan
didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib j
demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara
jang didjatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas
mohonan bekas-sifersangka atau ahli-warisnja pengadilan
dapat memutus, bahwa kepada bekas-sifersangka atau ahli
warisnja berikan sedjumlah wang sebagai penggantinya-ke
rugian. Djumlah wang itu dibebankan pada Kas Negwri.
Jang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan jang
mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.

BAB V.

Tentang perbuatan-perbuatan jang beretntangan dengan
hukuman pidana atau tindakan tata tertib.

Pasal 32.

Barang siapa sengadja berbuat atau tidak berbuat ses
jang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai
tertjantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau c, dengan
suatu tindakan tata tertib seperti tertjantum dalam pas
8, dengan suatu peraturan seperti termasuk dalam pasal
10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara, a
menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, per
turan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut
atas maka ia melaksanakan suatu tindak pidana ekonomi.

Pasal 33.

Barang siapa sengadja, baik sendiri maupun dengan per
tuan seorang lain, menarik bagian-bagian kekajaan untu
dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu
hukuman, tindakan tata tertib atau tin akan tata tertib
sementara, jang dijatuhkan berdasar Undang-undang Darur
itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

Pasal 34.

Pasal 34.

- (1). Perbuatan-perbuatan hukum-jang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 32 dan 33 adalah batal.
- (2). Pembatalan itu tidak dapat dipergunakan sebagai lawan jang merugikan seorang, jang tidak mengetahui tentang adanya hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan kan tata tertib sementara, jang dijatuhkan, ketjujukan djika padanja ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara itu.
- (3). Isteri (sumami), keluarga sedarah atau seketuarga semenda sampai dengan pupu ketiga dari dan mereka jang bekerdja pada orang, atas siapa hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara itu dijatuhkan, dianggap bahwa pada mereka ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, ketjujukan djika mereka dapat membuktikan sebaliknya.

BAB VI.

Tentang kekuasaan dan susunan pengadilan.

Pasal 35.

- (1). Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang djaksa atau lebih jang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntun perkara pidana ekonomi.
- (2). Pengadilan tersebut pada ayat 1 disebut, Pengadilan ekonomi;

Pasal 36.

Seorang hakim pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerdja pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.

Pasal 37.

Pengadilan Ekonomi dapat bersidang djuga diluar tempat kedudukan Pengadilan Negeri.

Pasal 38.

Ketentuan dalam pasal 36 berlaku sepadan bagi djaksa dan panitera Pengadilan Ekonomi.

Pasal 39.

- (1). Djika beberapa tindak pidana ekonomi dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dan tindak-tindak pidana itu satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga dianggap perlu, bahwa tindak pidana itu diadili oleh satu Pengadilan Ekonomi maka kekuasaan Pengadilan itu terhadap seseorang jang disebut tersangka atau pengusut-serta akan mengakibatkan bahwa Pengadilan itu djuga berkuasa mengadili orang-orang lain jang menjadi tersangka atau mengikut-se dalam perkara itu.

- (2) Djika sitersangka adalah suatu badan hukum, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, maka jang berkuasa ialah Pengadilan ditempat, dimana badan hukum perseroan, perserikatan orang atau jajasan itu berkedudukan atau mempunjai kantornja.

BAB VII.

Tentang pemeriksaan dimuka pengadilan dalam tingkat pertama.

Pasal 40.

Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Ekenomi dalam mengadili perkara pidana ekenomi berpedoman kepada atjara pidana jang berlaku bagi Pengadilan Negeri. *L. hukum*

BAB VIII.

Tentang bandingan.

Pasal 41.

- (1) Pada Pengadilan Tinggi di Djakarta diadakan Pengadilan Tinggi dengan nama Pengadilan Tinggi Ekonomi jang semata-mata diberi tugas mengadili perkara pidana ekenomi dalam tingkatan bandingan.
- (2) Pengadilan Tinggi Ekonomi terdiri dari seorang ketua seorang anggota Hakim Tinggi merangkap wakil-ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota Hakim Tinggi lainnya, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti.

Pasal 42.

Pengadilan Tinggi Ekonomi memutus perkara dengan tiga orang hakim, termasuk ketua dan wakil ketua.

Pasal 43.

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Ekonomi dapat dimohonkan bandingan, ketjuali djika putusan terachir diberik mengenai suatu pelanggaran ekonomi dan djika dalam putusan penghabisan :
- a. tidak didjatuhkan hukuman pidana lain atau tindakan tata tertib ;
 - b. tidak didjatuhkan hukuman pidana lain atau tindakan tata tertib lain dari pada :
 - 1e. hukuman denda ;
 - 2e. perampasan, pada mana ditaksir harga barang barang jang dirampas ;
 - 3e. pembajaran uang sebagai termaksud dalam pasal 8 sub c, jang tidak lebih banjak dari pada seribu rupiah ;
 - 4e. pembajaran uang-djaminan ;
 - 5e. mengembalikan siterhukum kepada ibu/bapaknja dengan tidak mendjatuhkan hukuman pidana.
- (2) Djaksa dapat memohon bandingan, ketjuali djika putusan terachir didjatuhkan mengenai pelanggaran dan

- a. tidak didjatuhkan hukuman atau tindakan tata-tib ;
- b. tidak dituntut hukuman pidana atau tindakan tertib lain dari pada hukuman pidana atau tindakan tata-tertib jang disebut dalam ayat 1 sub

Pasal 44.

Apabila pada peradilan tingkat pertama dilalaikan tjara-tjara jang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi, djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutannja atau pihak sitersangka dalam pembelaannja.

Pasal 45.

Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam meniadili perkara vidana ekonomi dalam tingkat bandingan berpedoman kepada hukum atjara pidana dalam tingkat bandingan jang berlaku bagi Pengadilan Tinggi.

Pasal 46.

Bagi Pengadilan Tinggi Ekonomi ketentuan dalam pasal 37 berlaku sepadan.

BAB IX

Tentang permohonan kasasi.

Pasal 47.

hal
Ketjuasi dalam ayat termaksud dalam pasal 48, maka terhadap utusan jang diambil mengenai suatu tindak pidana ekonomi, dapat dimajukan permintaan kasasi dalam waktu dan menurut tjara jang ditentukan untuk perkara vidana biasa dalam Undang-undang Makamah Agung.

Pasal 48.

- (1). Apabila pada peradilan dalam tingkat pertama atau dalam tingkat bandingan dilalaikan tjara-tjara jang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar jang membatalkan utusan itu. Djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutannja, atau pihak sitersangka dalam pembelaannja.
- (2). Hal jang tersebut pada ayat 1 itu dianggap ada, apa bila kelalaian itu dilakukan dalam tingkat pertama dan atas kelalaian itu tidak dimajukan keberatan, baik dari pihak kedjaksanaan maupun pihak tersangka.

BAB X

Tentang badan-badan atau pegawai-pegawai penghubung.

Pasal 49.

Untuk kepentingan pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, maka dengan persetujuan Menteri Kehakiman oleh Menteri jang bersangkutan dapat diangkat, badan-badan atau pegawai-pegawai jang dianggap oleh badan-pemraksaan sebagai badan atau pegawai penghubung.

kepada hakim, pegawai penuntut dan pengusut baik di luar maupun didalam persidangan.

BAB XI.

Ketentuan peralihan.

Pasal 50.

- (1). Segala perkara yang pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku telah diadili dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dianggap diadili atau diputus oleh Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat ini.
- (2). Perkara-perkara yang belum diadili akan diadili oleh Pengadilan Ekonomi menurut Undang-undang Darurat ini.
- (3). Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup.

- (1). Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2). Undang-undang Darurat ini disebut: „Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi,,.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Mei 1955,

Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO,

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO,

Menteri Kehakiman
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Perekonomian,
ROOSSENO,

Menteri Kesedjahteraan,
Negara,
SIRADJUDDIN ABBAS,

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE,

Diundangkan
pada tanggal 13 Mei 1955

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Untuk salinan yang serupa;
Kepala Expedisi,

Ketentuan peralihan.

Pasal 50.

- (1). Segala perkara yang pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku telah diadili dan diputus oleh satu atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dianggap diadili atau diputus oleh Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat ini.
- (2). Perkara-perkara yang belum diadili akan diadili oleh Pengadilan Ekonomi menurut Undang-undang Darurat ini.
- (3). Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup.

- (1). Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2). Undang-undang Darurat ini disebut: „Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi,,.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Mei 1955,

Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO,

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO,

Menteri Kehakiman
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Perekonomian,
ROOSSENSO,

Menteri Kesedjahteraan,
Negara,
SIRADJUDDIN ABBAS,

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE,

Diundangkan
pada tanggal 13 Mei 1955

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Untuk salinan yang serupa;
Kepala Expedisi,

=(T.M. A M I N) :-